

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG (STUDI
KASUS APLIKASI GAMPIL DAN HAYU)**

Oleh :

**MOCHAMAD ERSHA
152010114**

Disetujui untuk Diajukan pada Sidang Akhir Program Skripsi
Ilmu Administrasi Publik

Bandung, 2019

Menyetujui:
Pembimbing

Drs. Ediyanto, M.Si

Mengetahui:

Ketua
Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pasundan Bandung

Drs. Rudi Martiawan, M.Si

Dr. M. Budiana, S.IP, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Bersama surat ini, menyatakan:

1. Skripsi ini, asli hasil karya tulis saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, atau doctor), baik di Universitas Pasundan maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, hasil karya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pemnimbing dan penguji.
3. Skripsi ini, didalamnya tidak memuat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas sebagai rujukan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telas diperoleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanki lainnya sesuai dengan norma dan hukum yang diberlakukan di Perguruan Tinggi ini.

Bandung, Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan

Mochamad Ersha

152010108

VISI DAN MISI

UNIVERSITAS PASUNDAN



Luhung Elmuna

Pengkuh Agamana

Jembar Budaya

VISI DAN MISI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PASUNDAN

VISI :

Terwujudnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai pusat unggulan dalam pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik yang mengusung Budaya Sunda dan Nilai Islam baik di tingkat lokal, nasional dan internasional di tahun 2021.

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional
2. Melaksanakan penelitian dalam skala internasional melalui pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan pada pengembangan ilmu pengetahuan bersifat solutif
4. Menjadikan FISIP UNPAS sebagai pusat unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai profesionalisme ilmu sosial dan ilmu politik
5. Mengembangkan ilmu sosial dan ilmu politik yang berorientasi pada peningkatan kompetensi mahasiswa, dosen dan lulusan yang memiliki nilai keunggulan dan daya saing global
6. Membangun manusia yang memiliki karakter serta mampu menjunjung tinggi nilai religi (keislaman) dan nilai-nilai budaya daerah (kesundaan) baik ditingkat lokal, nasional.

VISI MISI
PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

VISI :

Menjadikan Program Studi Ilmu Administrasi Publik menghasilkan lulusan sarjana (S-1) yang unggul pada bidang Ilmu Administrasi Publik baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional dengan mengusung budaya Sunda dan nilai Islam pada tahun 2021.

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam menerapkan dan mengembangkan Ilmu Administrasi Publik sejalan dengan prinsip keunggulan dan daya saing.
2. Menyelenggarakan kajian ilmiah melalui kegiatan penelitian dalam upaya mengembangkan Ilmu Administrasi Publik di tingkat lokal, nasional, dan internasional serta aplikasinya sesuai dengan perkembangan Ilmu Administrasi Publik.
3. Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggung jawab akademik untuk kemajuan masyarakat dan memperkuat posisi lulusannya di masyarakat.
4. Menjalinkan kerjasama kemitraan dengan berbagai institusi terkait aplikasi dan pengembangan Ilmu Administrasi Publik yang mengusung nilai-nilai budaya lokal (kesundaan) dan religi (keislaman) baik di tingkat lokal, nasional, maupaun internasional.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”.

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)

“Kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang tangguh.”

(Peneliti)

“Our fate is within us. You just have to be brave enough to deal with it.”

(Whole Disney)

ABSTRAK

Pelaksanaan e-Government merupakan sebuah strategi akibat dari tuntutan masyarakat dalam membentuk sistem pemerintahan yang bersih transparansi dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif maka pelaksanaan e-Government pun diartikan sebagai upaya yang terwujudnya Good Governance (tata laksana pemerintahan yang baik). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Bandung yang berbasis aplikasi Gampil dan Hayu. Dalam laporan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai pelaksanaan e-Government dalam aplikasi Gampil dan Hayu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah peneliti kepustakaan dan penelitian lapangan meliputi observasi, wawancara, dan, dokumentasi. dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur pelaksanaan e-Government berbasis aplikasi Gampil dan Hayu, yang di kemukakan oleh Richardus Eko Indrajit (2005) tentang indikator penerapan e-Government, yaitu: Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber Laws, Citizen Interfaces, Capital. Pihak yang dijadikan informan Dalam penelitian ini adalah Kasubag IT, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Humas, Kasubag Keuangan, dan Masyarakat sebagai objek yang merasakan aplikasi Gampil dan Hayu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan e-Government dalam pelayanan perizinan berbasis aplikasi Gampil dan Hayu dapat dikatakan dengan baik dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Eko indrajit pada Indikator Kompetensi Building, Conectivity, Cyber Lows, Citizen Interface dan Capital, bisa dikatakan sudah baik, akan tetapi terdapat permasalahan terutama pada indikator Content Development. Hal tersebut menjadi suatu kekurangan atau permasalahan di dalam pelaksnaan e-Government, dan ditambah lagi permasalahan yang terjadi adalah tentang sosialisasi dan adanya edukasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Bandung kepada masyarakat. Haruslah ada peraikan atas permasalahan tersebut agar masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Bandung untuk membuat perizinan yang efektif, efisien, dan transparansi.

Kata Kunci : Good Governance, Pelaksanaan e-Goverenment, Pelayanan.

ABSTRACT

The implementation of e-Government is a strategy due to the demands of the community in establishing a government system that is clean of transparency and able to answer the demands of change more effectively. The implementation of e-Government is also interpreted as an effort to realize good governance. This study aims to find out how the implementation of e-Government in the Bandung Capital Investment and Integrated Services One-Stop Service based on Gampil and Hayu applications. In the report the results of this study will be discussed regarding the implementation of e-Government in the application of Gampil and Hayu in the Bandung Capital Investment and Integrated Services One-Stop Service.

This study uses qualitative methods using descriptive. While the data collection techniques used are library research and field research including observation, interviews, and, documentation. in this study the benchmark for e-Government implementation is based on the application of Gampil and Hayu, which was presented by Richardus Eko Indrajit (2005) on indicators of e-Government implementation, namely: Content Development, Competence Development, Connectivity, Cyber Law, Citizen Interfaces, Capital. The information made in this study is the Head of the IT Subdivision, the Head of Public and Civil Service Subdivisions, the Head of Public Relations Subdivision, the Head of the Subdivision of Finance, and the Community as an object that uses the Gampil and Hayu applications

The results showed that e-Government policy in licensing services based on Gampil and Hayu applications can be said to be well seen from the theory put forward by Eko Indrajit on Competency Building Indicators, Connectivity, Cyber Laws, Citizen Interface and Capital, it could be said to be good, but there are problems especially in the Content Development indicator. This becomes a deficiency or problem in implementing e-Government, and added to the problems that occur are about socialization and the existence of education conducted by the Bandung Capital Investment and Integrated Services One-Stop Service to the public. There must be a solution to the problem so that the community can take advantage of the facilities made by the Bandung Capital Investment and Integrated One-Stop Service to create effective, efficient, and transparent licenses.

Keywords: Good Governance, Implementation of e-Government, Services.

RINGKESAN

Palaksanaan e-government mangrupa hiji strategi alatan ti tungtutan balarea dina nyieun system pamarentahan anu bersih transparansi serta sanggem ngawalon tuntutan pahobahan scara langkung efektif makngka palaksanaan e-Government oge diartikeun minangka usaha anu ngawujudkeun Good Governance (Tata kalakon pamarentahan anu sae). Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo ameh terang kumaha palaksanaan e-Goverenment di Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bandung anu berbasis aplikasi Gampil sareng Hayu. Dina laporan kenging panaluntikan ieu bade ngabahas neguanaan palaksanaan e-Goverenment dina Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Panalungtikan ieu ngagunakeun padika kualitatif pendekatan deskriptif sedangkeun tekna nu di anggo pengumpulan data anu dianggo ku padika kepastakaan sarta panalungtikan lapangan ngawengku observasi, wawancara sangkan dokumentasi. Dina panalungtikan ieu anu babobah kaayaan tampik ukur palaksanaan e-Government berbasis aplikasi Gamping sareng Hayu, anu di kemukakeun ku Richardus Eko Indrajit (2005) ngeunaan indikator panerapan e-Goverenment nyaeta: Content Development, Competency Building, Conectifity, Cyber Law, Citizen Interfaces, sareng Capital.pihak anu dijadikeun informan dina panalungtikan ieu teh Kasubag Data, informasi sareng Evaluasi, Kasubag Umum Kapagawean, Kasubag Humas, sareng Kasubag keuang.

Sarta balarea minangka objek anu dituju ngarasakeun aplikasi Gampil sareung Hayu. Kenging panalungtikan nembongkeun yen kawajiban e-Government dina pangladen perizinan berbasis Aplikasi Gampil sareung Hayu tiasa di sebatkeun kalawan sae ditingal dina teori anu di ungapkeun ku Eko Indrajit dina indikator tiasa disebatkeun tos sae, tapi aya keneh anu masalah dina pangladen indikator Content Development. Perkawis kasebat barobah kaayaan dina hiji kakurangan atawa masalah jero palaksanaan e-Goverenment, sangkan ditambah deui masalah anu lumangsung nya eta ngeunaan sosialisasi sangkan kaayaan na edukasi anu di pagawe ku Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Kuduna aya paraikan luhur masalah ksebat supados balarea tiasa ngamangpaat keun Aplikasi Gampil sareung Hayu nu di damel ku Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung kanggo midamel perizinan anu efektif, efisien sangkan tranparansi.

Saur Kunci:pamarentahan alus, palkasnaan e-Government, panglade.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan kesehatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi.

Skripsi ini peneliti buat untuk memenuhi syarat dalam penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, dengan judul penelitian **“Pelaksanaan E-Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung (Studi Kasus Aplikasi Gampil dan Hayu)”**.

Peneliti menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan waktu, pikiran, kemampuan serta pengalaman peneliti dalam penyusunan laporan. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan dan sangat berterima kasih apabila ada masukan dari pembimbing, penguji maupun pembaca lainnya.

Sebagai ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada orang-orang yang telah mendukung peneliti dalam pembuatan Skripsi ini, yaitu yang terhormat

Pembimbing Bapak Drs. Ediyanto, M.Si yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan sabar untuk memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga laporan riset dan praktek ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si. M.Kom., selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. M. Budiana, SIP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
3. Bapak Drs. Kunkunrat, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak Dra. Hj.Yulia Segarwati, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
5. Bapak Drs. H.R Sumardhani, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
6. Bapak Drs. Rudi martiawan,M.Si, selaku ketua program studi Adminitrasi Publik Universitas Pasundan.
7. Ibu NR Ruyani, S. Sos, M. Si, selaku sekretaris program studi Adminitrasi Publik Universitas Pasundan.
8. Bapak Prof. Dr. H. Benyamin Harits M. Si, selaku dosen wali, penguji dan pembimbing yang telah sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran memberikan bimbingan arahan, motivasi dan saran-saran yang berharga kepada peneliti.

9. Ibu Dr. Ine Mariane, M.Si, selaku penguji dan pembimbing yang telah sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran memberikan bimbingan arahan, motivasi dan saran-saran yang berharga kepada peneliti.
10. Seluruh Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung terimakasih atas bantuannya dan telah menerima peneliti secara welcome di kantor.
11. Kedua orang tua Bapak dan Ibu, serta kedua saudara peneliti yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan motivasi serta saran maupun pesan moril yang sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang direncanakan oleh peneliti.
12. Sahabat-sahabat terbaiku Hafiz dan Nanda yang telah membantu dan tak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Penelitian ini.
13. Teman-temanku seperjuangan Iqbal Maulana, Imron Rosadi, Ratna, dan Silvi, terimakasih atas motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh peneliti yang mana telah membantu dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini.

Semoga atas bantuan, bimbingan, dorongan, dan pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak tersebut mendapatkan imbalan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini dapat

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi
Publik.

Wassalamualaikum wr. wb.

Bandung, Oktober 2018

Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mochamad Ersha

Tempat ,Tanggal Lahir : Jakarta, 07, Maret, 1997

Agama : Islam

Alamat : Jl.Ir.H.Juanda Belakang 340 Rt 06/07 Kel. Dago
Kec. Coblong Kota Bandung 40135

Nama Orang Tua

Ayah : Erwan Hidayat

Ibu : Yuli Wadiyati

Kakak : Elba Auliana

Adik : Eriska Nur Hasanah

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Sejahtera Bandung (2003 - 2009)
2. SMPN 40 Bandung (2009 - 2012)
3. SMAN 15 Bandung (2012 - 2015)
4. Universitas Pasundan Bandung (2015 – 2019)

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
VISI MISI UNIVERSITAS PASUNDAN	iii
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC.....	viii
RINGKESAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR RIWAYAT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah.....	8
1.2.1. Fokus penelitian.....	8
1.2.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN PROPOSISI	10
2.1. Kajian Pustaka.....	10
2.1.1. Definisi Administrasi.....	10
2.1.2. Definisi Organisasi	11
2.1.3. Definisi Manajemen.....	12
2.1.4. Definisi Administrasi Publik	12
2.1.5. Peranan Administrasi Publik	13
2.1.6. Ruang Lingkup Administrasi Publik	14
2.1.7. Paradigma Administrasi Publik	17
2.1.8. Pengertian Governance	21
2.1.9. Pengertian Good Governance	23

2.1.10. Membangun Good Governance	24
2.1.11. Prinsip-prinsip Good Governance	25
2.1.12. Definisi Sistem Informasi Manajemen	29
2.1.12.1. Definisi Sistem Informasi Manajmen	29
2.1.12.2. Komponen Sistem Informasi Manajemen.....	29
2.1.12.3. Tahap Sistem Informasi Manajemen	30
2.1.12.4. Perencanaan, Pengolahan dan Kerangka Sistem Informasi	31
2.1.13. Definisi E-Goverenment dan Konsep E-Government	33
2.1.13.1. Definisi E-Government	33
2.1.13.2. Konsep E-Government	35
2.1.14. Visi dan Manfaat E-Goverenment	38
2.1.14.1. Visi E-Government	38
2.1.14.2. Manfaat E-Goverenment.....	40
2.1.15. Elemen Sukses, Faktor-faktor, Strategi, dan Balanced E- Government Scorecard.....	42
2.1.15.1. Elemen Sukses E-Government.....	42
2.1.15.2. Factor-faktor E-Government.....	45
2.1.15.3. Strategi E-Government	48
2.1.15.4. Balanced E-Government	49
2.2. Kerangka Berfikir	52
2.3. Proposisi	56

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian	57
3.1.1. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.....	59
3.1.2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.....	60
3.1.3. Motto Layanan dan Maklumat layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung	60
3.1.4. Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.....	61
3.1.5. Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.....	63
3.1.6. Gambaran Aplikasi GAMPIL dan HAYU.....	66
3.2. Metode Penelitian.....	68
3.2.1. Tipe Penelitian	68
3.2.2. Penentuan Informan.....	69
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	70
3.4. Analisis Data.....	71

3.5. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	74
3.6. Jadwal Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
4.1. Hasil Penelitian.....	77
4.2. Pembahasan.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1. Kesimpulan.....	97
5.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	vii
LAMPIRAN.....	xxi

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

- Creswell, W , John. 2017, *Research Design*, Jilid IV, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gie, Liang. 1996, *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Indrajit, Richardius Eko, 2005, *E-Goverenment In Action*,Jilid I, Cet. I, Yogyakarta:Andi
- Indrajit, Richardius Eko, 2016, *Electronic Goverenment: Seri Bunga Rampai Pemikiran EKOJI*, Jilid II, Cet.I, Yogyakarta: Andi
- Lexy, J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jilid I, Cet. II, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mariane, Ine, 2018, *Azas-Azas Manajemen*, Jilid I, Cet. I, Bandung: Kencana Utama
- Pasolong, Harbani, 2017, *Teori Administrasi Negara*, Jilid I, Cet. I, Bandung : Alfabeta
- Rosidi, Abidarin, 2013, *Reinventing Government*, Jilid I, Cet. I, Yogyakarta : Andi
- Silalahi, Ulbert, 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Jilid I, Cet. X, Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset Bandung.
- Sugiono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kulitatif dan R&D)*, Jilid I, Cet.XXVI, Bandung : Alfa Beta

Satibi, Iwan, 2012, Manajemen Publik, Jilid I, Cet. I, Bandung: Unpas Press

DOKUMENTASI

UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi,
Media, dan, Informasi)

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan *Electronic Government*

DAFTAR LAMPIRAN

NOMOR	HALAMAN
1. PEDOMAN WAWANCARA KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN, KASUBAG KEUANGAN & PROGRAM DAN KASUBAG DATA, INFORMASI & EVALUASI	xiii
2. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KASUBAG HUMAS.....	xvi
3. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT	xvii
4. MATRIX HASIL WAWANCARA.....	xxviii
5. DOKUMENTASI	xlix
6. SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	xlx
7. SURAT IZIN PENELITIAN DINAS PENAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG	li
8. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN KESBANGPOL.....	lii

DAFTAR GAMBAR

NOMOR	HALAMAN
2.1 KERANGKA BERFIKIR	51
3.1 STRUTUR ORGANISASI DINAS PENAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG	61
3.2. ANALISIS DATA MENURUT MILES DAM HUBERMAN	70

DAFTAR TABEL

NOMOR	HALAMAN
3.1 JADWAL PENELITIAN.....	72

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Panduan wawancara dengan Kasubag Umum & Kepegawaian, Kasubag Keuangan & Program dan Kasubag Data, Informasi & Evaluasi :

Content Development

1. Apakah ada pengembangan system yang dilakukan terhadap aplikasi Gampil dan Hayu ?
2. Siapakah yang melakukan pengembangan system terhadap aplikasi Gampil dan Hayu ?
3. Apakah ada standarisasi dalam pengembangan system terhadap aplikasi Gampil dan Hayu ? apa bila ada bagaimana standarisasinya?

Competency Building

1. Apakah ada pelatihan dan pengembangan kompetensi diri terhadap pegawai ?
2. Jenis dan bentuk pelatihan apa yang diberikan ?

Connectivity

1. Bagaimana ketersediaan infrastruktur penunjang yang tersedia ?
2. Langkah dan tindakan apa sajakah yang dilakukan dalam mengatasi jika terjadi adanya kerusakan terhadap infrastruktur yang tersedia ?

Cyber Law

1. Peraturan Manakah yang mendasari penerapan E-Government berbasis aplikasi/online?
2. Bagaimana kekuatan aturan hukum yang mendasari Penerapan E-government berbasis aplikasi/online ini ?

Citizen Interfaces

1. Bagaimanakah kualitas SDM yang tersedia ? apakah sudah memenuhi standar yang dibutuhkan ?
2. Bagaimana proses dari pengadaan SDM yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung ?
3. Bagaimana pengembangan kanal akses aplikasi GAMPIL & HAYU ?

Capital

1. Berasal dari manakah modal/anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Penerapan aplikasi Gampil dan Hayu ?
2. Sejauh ini bagaimana pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan penerapan aplikasi Gampil dan Hayu ?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Panduan wawancara bersama Kasubag Humas:

1. Apakah ada publikasi aplikasi Hayu dan Gampil kepada masyarakat ?
2. Apakah ada rentang waktu dalam mempublikasikan aplikasi Gampil dan Hayu ini ?
3. Apakah ada kendala dalam Mempublikasikan aplikasi Gampil dan Hayu ?
4. Apakah ada antisipasinya bagi masyarakat yang belum melek dengan adanya teknologi maupun daerah yang belum terakses teknologi ?

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Panduan wawancara bersama masyarakat:

1. Apakah anda mengetahui adanya pelaksanaan E-Government pada pelayanan dan perizinan yang dilakukan secara online melalui system Gampil dan Hayu ?
2. Menurut pendapat anda apakah lebih mudah dan cepat manakah pelayanan perizinan secara online atau secara manual ?
3. Apakah ada hambatan/kendala dalam mengoperasikan/menggunakan E-Government berbasis aplikasi secara online maupun secara website ?
4. Apakah anda mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tentang aplikasi Gampil dan Hayu?

Lampiran 4

Matriks Hasil Wawancara

Kasubag Umum & Kepegawaian, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Data Informasi & Evaluasi

Pertanyaan	Jawaban
<p><i>Content Development</i></p> <p>1. Apakah ada pengembangan system yang dilakukan terhadap aplikasi Gampil dan Hayu ?</p> <p>2. Siapakah yang melakukan pengembangan system terhadap aplikasi Gampil dan Hayu ?</p>	<p>- kalau untuk pengembangan ada dan sudah dilakukan. Sesuai pada perkembangan teknologi dan juga dengan kebutuhan Jadi kalau pengembangan di setiap tahun juga kita ada pengembangan, bisa nanti ada kewajiban kita terkait perizinan contoh yang saat ini kan ada aplikasi baru ya itu OSS. yang mau tidak mau kita mesti ada penyesuaian agar bisa masuk kedalam pengembangan dan itu dilakukan setiap tahunnya.</p> <p>- Secara tidak langsung kan kami DMPTSP Kota Bandung saja, biasanya yang mengembangkan hanya sebagai pihak internal yang mengembangkan aplikasi</p>

<p>3. Apakah ada standarisasi dalam pengembangan system terhadap aplikasi Gampil dan Hayu ? apa bila ada bagaimana standarisasinya?</p> <p><i>Competency Building</i></p> <p>4. Apakah ada pelatihan dan pengembangan kompetensi diri terhadap pegawai ?</p>	<p>Gampil dan Hayu adapun pihak lain hanya tentang kebijakan, yang ada dari pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berbicara tentang pengembangan standar sejauh ini tidak ada Standarnya karena kita mengembangkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja oleh masyarakat, dengan pelayanan publik yang kita sajikan apa yang emang publik butuhan gitu saja tidak ada Standar tertentu. - Untuk pelatihan dan pengembangan memang sudah kita lakukan, apakah itu pelatihan maupun pengembangan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tinggal berkoordinasi dan mengintruksikan para pegawai untuk dapat mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut jenis pelatihan yang diadakan memang cukup banyak dan beragam.
---	--

<p>5. Jenis dan bentuk pelatihan apa yang diberikan ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk pegawai itu ada, seperti pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan lain sebagainya. Namun hal tersebut dilakukan jika ada panggilan dari pusat maupun kita sendiri yang menyelenggarakannya. - Sejauh ini bentuknya Pelatihan dan pengembangan biasanya lebih ke pada diklat internal untuk pegawai biasanya seperti itu dan lebih ke sistem aplikasi apa yang lebih dipakai ke yang spesifik. itu yang dipakai di saat ini dan juga yang sedang dilaksanakan, ke pegawai itu biasanya berbentuk diklat atau pelatihan pelatihan teknis begitu. - Untuk jenis nya kita malakukan pelatihan diklat yang terkadang kita mengundang atau pun diundang dari Kementerian perekonomian sebagai koordinator untuk aplikasi ini, kita undangan pelatihan dari PKTM terkait untuk investasi Terus kalau untuk pelatihan sisanya paling kita suka ada undangan dari BKPM
---	--

<p><i>Connectivity</i></p> <p>6. Bagaimana ketersediaan infrastruktur penunjang yang tersedia ?</p>	<p>maupun dari Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Kemudian dari PUPR untuk pelatihan aplikasi yang digunakan dan perizinan baru kemarin kita mengirimkan ke Surabaya satu orang bernama Pak Nana menghadiri undangan dari BKPM terkait data asesmen. kemarin juga kita mendapat undangan dari PUPR untuk pelatihan aplikasi SIMBG di Jogja Jadi kita sekarang lebih memperhatikan antara undangan dari pusat maupun yang ada di kita sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari segi teknologi atau infrastruktur yang kami miliki sudah berkembang atau memadai sejauh ini apa yang kita punya bisa mendukung apa yang akan dilakukan jadi yang sarana yang kita punya untuk mendukung proses pelayanan berbentuk perizinan berbasis aplikasi Gampil dan Hayu di bisa dibilang dalam kategori memadai. - Dari infrastruktur yang ada sarana dan
---	---

<p>7. Langkah dan tindakan apa sajakah yang dilakukan dalam mengatasi jika terjadi adanya kerusakan terhadap infrastruktur yang tersedia ?</p>	<p>prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, utamanya pada bagian IT sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam mengoperasikan dan mengembangkan aplikasi Gampil dan Hayu yang sebagian besar kondisi infrastruktur yang dimiliki masih memiliki kondisi yang baik dan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. namun memang dari beberapa infrastruktur ada beberapa yang mengalami kerusakan itu pun bisa kami segera perbaiki agar perizinan yang diberikan di dalam aplikasi itu dapat dioperasikan kembali tanpa merugikan masyarakat.</p> <p>- Jika terjadi adanya hal seperti itu yaa kita lihat dulu kondisi perangkat yang ada, kalau memang masih bisa digunakan dan dilakukan perbaikan, yaa dilakukan dulu. Kecuali kalau memang sudah benar- benar tidak bisa dipakai, dilakukan perbaikan</p>
--	---

<p><i>Cyber Law</i></p> <p>8. Peraturan Manakah yang mendasari penerapan E-Government berbasis</p>	<p>pun tidak bisa, baru proses pergantian kami lakukan dengan mengajukan pengadaan barang/perangkat ke pusat. Namun memang proses pengadaannya butuh waktu lama, jadi kalau terjadi kerusakan tidak dapat langsung diganti, kecuali kalau memang ada cadangan yang tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika terjadi kerusakan terhadap infrastruktur yang ada, terutama seperti komputer, printer, alat/mesin pencetak dan sebagainya, antisipasi dan langkah yang kami ambil sih biasanya dengan melakukan pemberian pinjaman alat/infrastruktur cadangan yang ada kepada bagian yang membutuhkan tersebut. Karena jika berbicara penggantian dengan yang baru - Dalam pelaksanaan berbagai sistem sistem perizinan yang dilakukan secara elektronik
--	--

<p>aplikasi/online?</p>	<p>pertama pada aplikasi Gampil dan Hayu hal tersebut diatur oleh masing-masing kerangka hukum atau undang-undang yang mendasarinya seperti dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan daerah bentuk pembaharuan antara lain penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik guna menciptakan salah satu asas penyelenggaraan yang baik dan instruksi Presiden RI No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan startegi Nasional Pengembangan e-government dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government merupakan acuan dalam penerapan e-goverenment.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam sistem pengolahan data dan informasi yang dilakukan didasarkan pada aturan atau dasar hukum yang
-------------------------	---

<p>9. Bagaimana kekuatan aturan hokum yang mendasari Pelaksanaan e-Government berbasis aplikasi/online ini ?</p> <p><i>Citizen Interfaces</i></p> <p>10. Bagaimanakah kualitas SDM yang tersedia ? apakah sudah memenuhi standar yang dibutuhkan ?</p>	<p>mengaturnya yaitu, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 14 Tahun 2008, dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No 57 Tahun 2003.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kekuatan hukum sudah jelas karena dasar dari pelakasnaan e-Government ini kan berdasarkan pada UU,PERPES, dan PERWAL maka keuatan hukumnya sudah cukup mendasari dan kuat. - Kekuatan hukum kita mengikuti berdasarkan pada aturan yang ada karena kami instansi maka kita mengikuti peraturan yang di buat oleh pemerintah berdasarkan UUD, UU, PERPRES, dan PERWAL. - Ya untuk sejauh ini SDM yang ada dikita saat ini sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan bila ada kekurangan kita tinggal membuat pelatihan untuk meningkatkan
--	--

<p>11. Bagaimana proses dari pengadaan SDM yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung ?</p>	<p>kompetensi SDM di DMPTSP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kualitas sendiri kita bilang sudah cukup baik karena kita selalu membuat pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai agar dapat meningkatkan kualitas dari pegawai itu sendiri maupun ayang dia kerjakan bisa memberikan hasil yang baik, oleh karena ini kita selalu membuat diklat atau pelatihan yang tujuannya agar SDM yang kita punya berkompeten. - kita disini untuk sistem pengadaan SDM mengikuti sistem rekrutmen PNS di kota Bandung terpusat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP. Maka dari itu mereka yang mempunyai informasi kira-kira Apakah kekurangan pegawai atau tidak, kalau kita dari segi untuk penambahan dan pengurangan ada kebijakan di mereka paling untuk yang unit internal sendiri paling kita meningkatkan kompetensi SDM yang ada saja.
--	---

12. Bagaimana pengembangan kanal akses aplikasi GAMPIL & HAYU ?

- Yang hubungannya dengan pengadaan SDM itu BKPP karena memang ada atau perangkat daerah yang memang apa punya kapasitas di situ untuk penempatan karyawan dan lain-lain bahkan untuk kisahnya yang dia pegang jabatan di sini kan di sini yang mengatur BKPP kepegawaian.
- Sebelumnya saya ingin pengelompokan dahulu masyarakat bukan berarti saya diskriminasi ya pengelompokan antara penyedia dengan penggunaan itu kan urusannya berbeda, kalau yang diperguna urusannya dengan mensek bisa dengan faktor-faktor nonteknis kayak kebiasaan terdulu nih kalau kita ngomongin perizinan dulu itu ada main setnya gini saya punya duit saya kasih duit ke orang suruh beresin oke beres pada saat ia dipaksa untuk membuat sendiri dia bingung dan itu yang terjadi di publik

<p><i>Capital</i></p> <p>13. Berasal dari manakah modal/anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Penerapan aplikasi Gampil dan Hayu ?</p>	<p>seperti itu. penyedia kita sudah sesuaikan nih yang lagi berkembang di masyarakat dan kedepannya kita menyediakan akses yang bisa digunakan untuk mempermudah masyarakat untuk bisa melakukan pengaduan dan lain-lain. Dengan menggunakan media yang digunakan berupa aplikasi yang kita pakai (sosial media), kita sudah menyesuaikan juga pengembangan kanal akses dengan yang lagi happening di masyarakat sejauh ini juga sudah tepat pengembangan kanal akses yang kita lakukan.</p> <p>- Anggaran biaya yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan utamanya dalam pembuatan atau pengembangan aplikasi Gampil dan Hayu dari itu anggarannya berasal dari APBD yang digunakan selama ini dan kami sudah merencanakannya.</p>
--	--

14. Sejauh ini bagaimana pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan penerapan aplikasi Gampil dan Hayu ?

- Berdasarkan aturannya kita menggunakan APBD dana atau anggaran itu juga kita bisa digunakan untuk mensupport kita dalam pengembangan aplikasi Gampil dan Hayu yang mau kita sajikan teruntuk masyarakat sendiri, dan untuk masalah permodalan menganggap ini bukan sesuatu yang kalau dibidang masalah hingga kau permodalan kita tinggal anggarkan saja karena dana yang digunakan sudah jelas asalnya dari mana.
- Anggaran yang ada tersebut dialokasikan untuk menunjang berbagai kegiatan pelayanan yang dilakukan, baik untuk pengelolaan, pemeliharaan dan lain sebagainya. Jadi anggaran yang dialokasikan tersebut kepada kita sifatnya itu lebih mengarah kepada pengalokasian untuk kegiatan pengelolaan terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita didalam

	<p>aplikasi dalam pengembangan dan pemuatan aplikasi baru.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengalokasian anggaran yang ada itu hanya digunakan untuk pengelolaan saja, seperti pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur maupun pengembangan dan pembuatan aplikasi lainnya.
--	---

Lampiran 5

Matriks Hasil Wawancara

Kasubag Humas

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah ada publikasi aplikasi Hayu dan Gampil kepada masyarakat ?	- Tentu saja ada, Hayu itu di launcing 28 Mei 8 Mei 2015 Kemudian untuk gampil nya itu tahun 2016 27 Februari 2016 dan untuk promosinya kita bekerja sama dengan 20 Media Media elektronik kemudian di koran juga kita sosialisasinya juga.
2. Apakah ada rentang waktu dalam mempublikasikan aplikasi Gampil dan Hayu ini ?	- Itu sudah lama ya kita masih mempublikasikannya cuman lewat radio itu kita tiap minggu dengan radia yang berbeda beda saya lupa lagi udah lewat radio mana saja tapi ada 20 radio. kita juga mencoba mempublikasikan dengan menggunakan koran, waktu itu tuh 5 media kita juga mempublikasikannya di kecamatan juga kita publikasikan dengan 30 Kecamatan dan sekarang kita

<p>3. Apakah ada kendala dalam Mempublikasikan aplikasi Gampil dan Hayu ?</p>	<p>lebih ke medsos aja ke media daring menggunakan cara yang mudah pula di akses oleh masyarakat juga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendala mempromosikannya sih mungkin nggak terlalu ini cuman mungkin penerapannya di kami ada beberapa kendala pengaplikasiannya mungkin karena sistem baru ada trail n eror nya gitu ya tapi kalau misalnya pengaplikasiannya kepada beberapa masyarakat yang mungkin agak sedikit belum paham kayak gitu yang pendidikannya maaf kurang paham dengan teknologi juga mungkin ya itu mungkin ada kendala kayak yang kayak gitu. itu kalau untuk generasi yang kayak gitu kita sih membuat langkah kita bikin edukasi kemasyarakat gini nih Cara pakainya dari YouTube atau apa tutorial di Instagram juga di Twitter juga kita buat tutorialnya bikin yang paling lucu yang dengan membuat video animasi ya seperti itu langkah-langkahnya yang pernah saya
---	--

<p>4. Apakah ada antisipasinya bagi masyarakat yang belum melek dengan adanya teknologi maupun daerah yang belum terakses teknologi ?</p>	<p>buat sih untuk reklame untuk dulu itu ada izin usaha mikro dan usaha kecil menengah itu kita buat itu mempermudah untuk pendidikan kayak gitu ya kita datang komunitasnya kita ajarin kita tampilkan juga tutorial yang sudah dibuat.</p> <p>- Untuk itu kita masih publikasi di koran karena ada anggaran untuk publikasi di media masa sekarang pun ada setiap tahun pasti ada. kita juga publikasi lewat siaran televisi siaran televisi lokal ketika sosialisasinya ya ketika kita juga ada yang bisa dijangkau, terus kita juga memasang publikasi kepada masyarakat dengan menggunakan Megatron apalagi ketika itu durasinya banyak berapa menit untuk lokasi itu ada di Cicadas ada terus di Merdeka Kalau sekarang sih mungkin ada beberapa titik tapi nggak sebanyak Dulu.</p>
---	--

Lampiran 6

Matriks Hasil Wawancara

Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah anda mengetahui adanya pelaksanaan E-Government pada pelayanan dan perizinan yang dilakukan secara online melalui system Gampil dan Hayu ?	<ul style="list-style-type: none">- Saya baru mengetahuinya ketika saya menyuruh pegawai saya, ketika saya memerintahkannya mengurus perizinan, ternyata sekarang sudah menggunakan aplikasi.walau pun saya tidak heran karena di kantor saya pun sudah menggunakan aplikasi dalam bekerja.- Ya, saya sudah mengetahuinya, ketika saya pertama kali ke DMPTSP ternyata layanan sudah menjadi online/ aplikasi dan saya datang kesini kali ke 2.- Saya sudah mengetahui nya ketika itu ada sosialisasi dari DMPTSP hadir pada acara ekonomi makro, menjelaskan pembuatan perizinan sudah menggunakan aplikasi.

<p>2. Menurut pendapat anda apakah lebih mudah dan cepat manakah pelayanan perizinan secara online atau secara manual ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sebenarnya menggunakan menggunakan aplikasi jauh lebih mudah akan tetapi sosialisasi perlu digencarkan kepada orang awam utamanya. - Saya rasa untuk sekarang ini kurangnya sosialisasi dari DMPTSP nya sendiri boleh dikatakan internet itu lebih mudah aksesnya itu masih lebih banyak kendala karena sosial sosialisasi yang kurang adanya kendala dalam internet tidak bisa diulang maka kita harus kembali lagi ke kantor, saya rasa kali ini masih kurang efektif dengan adanya aplikasi ini Apabila dibidang bagus-bagus tapi hanya saja aplikasi ini masih kurang sosialisasinya dan juga akun aplikasi ini juga sering terkadang masyarakatnya lupa tentang username password dan emailnya tersebut. - Sebenarnya menggunakan aplikasi ini mudah Hanya hanya saja aplikasi ini masih belum sempurna karena masih ada beberapa kesalahan yang terdapat pada aplikasi ini.
---	---

<p>3. Apakah ada hambatan/kendala dalam mengoprasikan/menggunakan E-Government berbasis aplikasi secara online maupun secara website ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Yang saya temui ada kendala nya Kita kan sudah diberikan username beserta passwordnya akan tetapi berapa kali kita coba dalam login sering tidak masuk kedalam server tersebut salah satunya ini menjadikan kendala bagi saya karena ada error nya tersendiri. - secara aplikasi mudah digunakan, hanya saja seperti yang saya tadi katakan kesulitannya ketika ada kesalahan data saja tidak bisa di selsaikan di di aplikasinya saja. - Aplikasinya mudah diakses hanya saja belum sempurna masih terdapat beberapa permasalahan edukasi penggunaan aplikasi sendiri masih kurang terhadap masyarakat yang awam sehingga saya menyempatkan datang agar mendapat edukasi dari dinas tersebut karena dia 4.1 menggunakan aplikasi
--	---

<p>4. Apakah anda mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tentang aplikasi Gampil dan Hayu?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saya pernah saya merasakan sendiri kan saya sedang Mendirikan perusahaan atau PT saya mengetahui itu semua dari notaris begitu akses selesai semua perizinan sudah menggunakan OSS jadi secara sosialisasi saya belum tahu mengetahui sama sekali adanya perubahan dari manual menuju online atau berbasis aplikasi karena sosialisasinya masih dirasa kurang, perlu adanya ke kegu keguna agar mengetahui diberi pengetahuan tentang aplikasi tersebut. - Saya tahunya berawalan ketika ingin membuat perizinan, nggak tahunya dari DMPTSP.go.id bahwa perizinan sudah menggunakan aplikasi ketika itu saya ditunjuk oleh kantor untuk membuat surat perizinan TDP yang kemudian untuk membuat SIUP website tersebut sudah diganti menjadi makanya saya menanyakan langsung kepada pihak perizinan - Karena saya aktif di grup UMKM saya
--	---

	<p>tahu dari UMKM tersebut karena dinas dan DMPTSP memberitahukan kepada kami semua dari dinas tersebut karena na karena mereka yang mendatangi kami pada UMKM untuk memberitahu Bagaimana cara pembuatan perizinan yang sekarang. sebetulnya untuk sosialisasi ini masih kurang harusnya lebih mengena kepada masyarakat yaitu tersendiri artinya sosialisasi yang nyata itu dikumpulkan organisasi-organisasi yang membutuhkan perizinan yang sudah Satu Atap sehingga semua orang mengumpulkan perizinan dengan menggunakan aplikasi ini sehingga aplikasi ini bisa disosialisasikan perkumpulan pada mahasiswa mahasiswi atau pelajar dan lain-lainnya dikumpulkan untuk edukasi dalam mensosialisasikan aplikasi ini dan juga kita hanya sebagai masyarakat hanya mencari info sendiri tentang penggunaan aplikasi ini itulah kesulitan yang dihadapi oleh kami utamanya dalam pembuat perizinan.</p>
--	--

Lampiran 7

Dokumentasi



Dian Aprilian
Kasubag Data, Informasi & Evaluasi



Rina Mariana S.I.Kom
Kasubag Humas



Salman Al-Hadi SE,Me
Kasubag Umum dan Kepegawaian